



# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



## RENJA TAHUN 2024

# bangga  
melayani  
bangsa

### DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM



**DUKCAPIL**  
**GO**  
**DIGITAL**



Jalan Ir. Sutami Kec. Sekupang, Batam



<https://disdukcapil.batamgo.id>

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas - tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, serta terselesaikannya penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024. Renja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2024 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah melalui perangkat daerah, maupun masukan dan partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rangkaian kegiatan penataan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Oleh karena itu perbaikan demi perbaikan akan terus kita lakukan. Sebagai penutup kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024.

Batam, 03 Agustus 2023



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,**

**HERYANTO, SE**

Nip. 19641107 199203 1 015

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b> .....	<b>11</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah .....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
2.3 Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah .....	26
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	30
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ....	37
<b>BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>38</b>
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional .....	38
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah .....	40
3.3 Program dan Kegiatan .....	41
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	<b>47</b>
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 .....	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam .....	22
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Batam .....	31
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Batam .....	37
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Batam .....	42
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam .....	48

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

##### **1.1.1 Pengertian Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Menurut Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah melalui perangkat daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang merupakan rangkaian kegiatan penataan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Rencana Kerja ini merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2024 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

##### **1.1.2 Proses Penyusunan Renja**

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 16 ayat (2) Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:

1. Persiapan penyusunan
2. Penyusunan rancangan awal
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
5. Perumusan rancangan akhir;
6. Penetapan.



Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 terutama berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026 dengan mengakomodasi aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta disinergikan dengan Program Nasional, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam 2021-2026.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 ini selaras dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :

1. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat termasuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD);
2. Pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak;
3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
4. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 ini dijadikan acuan untuk bahan penyusunan RAPBD Kota Batam Tahun Anggaran 2024 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

### **1.1.3 Keterkaitan antara Renja PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya**

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah disusun dalam kurun waktu 5 tahunan yang merupakan sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. Renstra Perangkat Daerah berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan

arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program kegiatan Perangkat Daerah yang disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, Renja PD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya. Hubungan Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

1. Renja PD disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam RKPD Walikota melalui mekanisme musrenbang;
2. Renja PD disusun dengan berpedoman pada Rensra Perangkat Daerah, yang di dalamnya memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dengan indicator dan target capaian pada setiap tahunnya;
3. Renja PD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi kewenangan serta tugas pokok dan fungsi dari Perangkat Daerah;

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan Renja PD Tahun 2024 ini harus mengacu dan berpedoman pada dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 s.d 2026 serta RKPD Walikota Batam Tahun 2024. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan teknis tahunan. Penyusunan dokumen Renja PD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, substansi penyusunan Renja PD harus selaras dengan dokumen perencanaan lain.

## **1.2 Landasan Hukum**

Sejalan dengan reformasi disegala bidang telah membawa perubahan mendasar dibidang manajemen pemerintahan, wujudnya antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Penduduk Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
  8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);



9. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-el;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Permendagri 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Nasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742)
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041;

21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2025;
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
24. Peraturan Walikota Batam Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026;
25. Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Batam;
26. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024

Payung Hukum sebagaimana tersebut merupakan tujuan tertib administrasi pemerintahan yang efisien, efektif, profesional, akuntabel dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **➤ Maksud**

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Propinsi Kepulauan Riau dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 serta Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021-2026.

#### **➤ Tujuan**

Penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 dengan tujuan untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang urusan kependudukan dan pencatatan sipil selama 1 (satu) tahun kedepan

agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan serta sebagai sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

Daftar Isi

Daftar Tabel

### **BAB I PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja Kementerian, Renja Provinsi dan Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

#### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun 2021) dan prakiraan capaian tahun berjalan (tahun 2022), mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD 2021, dan realisasi Renstra PD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, sesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berisikan pembahasan hal-hal antara lain :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (**Milenium Development Goals**).
4. Peluang dan Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Formulasi isu-isu penting/strategis berupa rekomendasi dan pencatatan yang strategis prioritas tahun yang direncanakan.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hal analisis kebutuhan.
2. Penjelasan mengenai proses tersebut dilakukan.
3. Penjelasan temuan dan catatan penting.
4. Lampiran tabel.

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun langsung dari Kelurahan/Kecamatan berdasarkan hasil pengumpulan informasi berdasarkan pelaksanaan pelayanan kependudukan di Kelurahan/Kecamatan oleh masyarakat.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut kebijakan dan



prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi sedangkan Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan pembahasan hal-hal antara lain :

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
3. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

## **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi antara antara lain :

1. Pencatatan penting yang mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggarannya tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2022 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Hasil monitoring dan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 menunjukkan adanya hasil capaian kinerja program yang tidak mencapai 100%. Berdasarkan data LKPJ Tahun 2022 Program Pencatatan Sipil dengan target kinerja sebesar 98% hanya terealisasi 95,54%.

Selanjutnya untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 kegiatan telah memenuhi target kinerja sebesar 100%. Adapun 5 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Pada tahun anggaran 2022 data LKPJ terdapat 2 Program yang melebihi target kinerja yang telah direncanakan. Program Pendaftaran Penduduk dengan realisasi sebesar 97,48% dari target 80% dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan realisasi sebesar 38,48% dari target 34%.

Tidak adanya lagi dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK-NF Yanminduk) dari Pemerintah Pusat pada tahun 2022 juga menggerus kemampuan APBD dalam membiayai belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Padahal masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi Perangkat

Daerah dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, antara lain :

1. Sarana prasarana kerja yang kurang memadai, khususnya gedung kantor yang sempit dan tidak representatif lagi dalam menampung tingginya mobilisasi masyarakat Kota Batam dalam melakukan pengurusan Adminduk setiap hari sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat belum optimal.
2. Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap metode pengurusan administrasi kependudukan sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang lebih memilih menitipkan pengurusan dokumen administrasi kependudukannya melalui orang lain atau bahkan calo.
3. Tingginya produksi arsip aktif setiap hari dan belum tersedianya ruangan arsip yang memadai menyebabkan pengelolaan arsip belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
4. Kurangnya profesionalitas aparatur, khususnya dalam hal :
  - a. Kompetensi dibidang pelayanan Adminitrasi Kependudukan.
  - b. Teknis penyusunan perencanaan dan strategi dalam menghadirkan pelayanan prima.
5. Kurangnya kesempatan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
6. Sistem SIAK Terpusat yang sedang dikembangkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri saat ini yang merupakan produk reformasi administrasi kependudukan tentu masih terdapat kendala dalam penerapannya dan secara terus menerus masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan.

Pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan 2 Program 7 Kegiatan dan 15 Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran yang tertuang dalam DPA Perubahan T.A. 2022 adalah :

1. BELANJA OPERASI
    - 1) Belanja Pegawai : Rp. 11.363.090.503,-
    - 2) Belanja Barang dan Jasa : Rp. 4.883.234.085,-
  2. BELANJA MODAL
    - 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin : Rp. 20.330.000,-
    - 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan : Rp. 519.536.000,-
- TOTAL ANGGARAN** : Rp. 16.786.190.588,-

Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat 2 Sub Kegiatan yang harus dirasionalisasi atau dikurangi yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Hal ini tentu berimplikasi terhadap pencapaian target Renstra tahun berjalan. Hal ini terlihat dari adanya program kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional hendaklah dilakukan oleh *stakeholder* terkait di masa yang akan datang dengan memperhatikan isu-isu dan kebutuhan sectoral masing-masing perangkat daerah yang tentu saja berbeda.

Adapun rincian hasil evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan tahun 2022 yang dikaitkan terhadap prakiraan tingkat realisasi capaian target Renstra s.d. Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1 di bawah ini:





Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	1	1	2.0	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
				<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			76 orang/ Bulan	76 orang/ Bulan	76 orang/ Bulan	76 orang/ Bulan
				<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	22 Dokumen
2	1	1	2.0	<b>Kegiatan</b> Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	100 %	100 %	-	-	-	-
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			-	-	-	-
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			-	-	-	-
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	1 1 2.0 2 6	<b>Kegiatan</b> Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
		<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			7 Paket	7 Paket	7 Paket	5 Paket	5 Paket
		<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			-	-	-	2 Paket	2 Paket
		<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket
		<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	32 Laporan	32 Laporan
2	1 1 2.0 2 7	<b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi pemerintah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	2 Unit	14 Unit	14 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.1.1.2.0	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	<b>Sub Kegiatan</b> Terlaksana nya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan
2.1.1.2.0	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	<b>Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			6 Unit	6 Unit	6 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			45 Unit	45 Unit	45 Unit	52 Unit	52 Unit	52 Unit

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	2 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
2	1	2			80%	<b>97,48%</b>	<b>121,85 %</b>	<b>87 %</b>	<b>98%</b>	<b>112,64 %</b>
2	1	2	2.		100 %	-	-	100 %	100 %	100 %
			0							
			1							
	Sub Kegiatan Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan			-	-	-	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
	Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk			-	-	-	120.000 Dokumen	120.000 Dokumen	120.000 Dokumen
2	1	2	2.		100 %	100%	-	-	-	-
			0							
			2							
	Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani dokumen kependudukan sesuai ketentuan			-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia			-	-	-	-	-	
2	1 2 2 0 3	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	400 Orang	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	
		Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
2	1 2 3	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil</b>	<b>100 %</b>	<b>97,50%</b>	<b>98 %</b>	<b>95,54 %</b>	<b>97,49 %</b>	<b>98,50 %</b>	<b>98,50 %</b>	<b>100 %</b>
2	1 2 3 2 0 1	<b>Kegiatan</b> Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	100 %	-	-	-	-	100 %	100 %	100 %
		Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			-	-	-	36.000 Dokumen	36.000 Dokumen	36.000 Dokumen



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah ) Tahun 2021 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan (Renja) perangkat Daerah tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d. tahun berjalan		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d. tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
2	1 2	3 20 2	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	400 Orang	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
			Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil			-	-	-	1 Laporan	1 Laporan
2	1 2	4	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan</b>	<b>100 %</b>	<b>17 %</b>	<b>34 %</b>	<b>35,48%</b>	<b>104,35%</b>	<b>48%</b>	<b>48%</b>
2	1 2	4 2.0 1	<b>Kegiatan</b> Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama</b>	100 %	17%	34 %	35,48%	104,35%	48 %	48,38% %
			<b>Sub Kegiatan</b> Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
2	1 2	4 2.0 3	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	500 Orang	-	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang
			<b>Sub Kegiatan</b> Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

Dari table di atas berdasarkan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 menunjukkan adanya sub kegiatan yang tidak terealisasi karena adanya rasionalisasi akibat keterbatasan anggaran. Berdasarkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terdapat 2 Sub Kegiatan yang harus dirasionalisasi atau dikurangi yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Hal ini tentu berimplikasi terhadap pencapaian target Renstra tahun berjalan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi guna penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, IKK Outcome Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencakup 4 (empat) hal pokok yaitu Persentase Perekaman KTP Elektronik, Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari, Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dan Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama.

Adapun gambaran kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dapat dilihat dalam tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**

No	Indikator	SPM /standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>A.</b>	<b>Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>											
	1) Persentase Perekaman KTP Elektronik		√	80%	87%	94%	98%	97,48%		99%	99%	
	2) Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak		√	42%	50%	60%	70%	50,39%		70%	80%	
	3) Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (anak usia 0-17 tahun)		√	98%	98,5%	99%	99,5%	95,54%		99%	99,5%	
<b>B.</b>	<b>Persentase stakeholder yang telah memanfaatkan database kependudukan</b>											
	4) Persentase jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		√	34%	48%	100%	100%	35,48%		53%	100%	

Berdasarkan table 2.2. di atas dapat dilakukan analisa kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dengan rasio perhitungan sebagai berikut :

1. Persentase Perekaman KTP-Elektronik dihitung dari Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-El dibagi jumlah penduduk Wajib KTP dikali 100% sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-El}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP-el}} \times 100\%$$

Sampai dengan semester 2 tahun 2022 Perekaman KTP-Elektronik mencapai 97,48 % dari target Renstra sebesar 80 %, dengan demikian capaian kinerja mencapai 121,85 %.

2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dihitung dari jumlah anak yang telah memiliki KIA dibagi jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari dikali 100 % dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah anak yang telah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari}} \times 100\%$$

Target Nasional penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2022 adalah sebesar 42 %. Saat ini capaian penerbitan Kartu Identitas Anak Kota Batam sudah mencapai 50,39 %, artinya capaian penerbitan Kartu Identitas Anak Kota Batam sudah berhasil melampaui target Nasional.

3. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran dihitung dari jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (anak usian 0-18 tahun) dibagi jumlah anak usian 0-18 tahun dikali 100 %, sebagaimana rumus digambarkan pada rumus perhitungan di bawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran (anak usia 0-18 tahun)}}{\text{Jumlah anak usia 0-18 tahun}} \times 100\%$$

Sampai dengan semester 2 tahun 2022 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran sudah mencapai 95,54 % dari target Renstra sebesar 98 %, artinya capaian kinerja mencapai 97,49 %.

4. Persentase jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dihitung dari jumlah OPD yang telah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan dibagi jumlah OPD yang melakukan perjanjian kerja sama dikali 100 %, sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah OPD yang telah mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan}}{\text{Jumlah OPD yang melakukan perjanjian kerja sama}} \times 100\%$$

Karena adanya perubahan kebijakan dari pemerintah pusat, saat ini terdapat kendala dalam mencapai target indikator OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja. Berdasarkan surat edaran Ditjendukcapil Kemendagri bahwa adanya persyaratan tambahan Sertifikat *ISO 27001:2013* bagi OPD yang ingin mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Disamping itu ketersediaan *internet private*/jaringan tertutup di Pemerintah Kota Batam masih terbatas di area Batam Center saja yang menyebabkan OPD yang ada di wilayah Sekupang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin akses pemanfaatan data kependudukan.

Selain 4 (empat) IKK *Outcome* Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di atas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah. Untuk mewujudkan Pemerintah Kota Batam yang *Good Governance* melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam memiliki tekad dan komitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan menetapkan Standar Pelayanan (SP) untuk pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan dengan rata-rata membutuhkan waktu 1 hari kerja. Dengan ketentuan persyaratan lengkap. Sedangkan khusus pelayanan penerbitan dokumen akta perkawinan sesuai alur dan proses yang telah diatur dalam

aturan Perundang-Undangan ditetapkan maksimal 14 (empat belas) hari kerja.

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2022 dan pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksud untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan target kinerja (*performance plan*) tahun 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi.

Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kerja, berdasarkan sasaran dan program dalam rencana strategis. Angka persentase pencapaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Skala pengukuran ordinal capaian kinerja tersebut dibagi empat poin seperti yang tertulis dalam tabel dibawah ini :

### **Skala Pengukuran ordinal capaian kinerja**

#### **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>RENTANG CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI CAPAIAN KINERJA</b>
1.	85 % - 100 %	Sangat Baik
2.	70 % - < 85 %	Baik
3.	55 % - < 70 %	Sedang
4.	< 55 %	Kurang Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat pencapaian sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target. Persentase hasil pencapaian dikelompokkan menjadi 4 (empat) klasifikasi penilaian seperti tabel diatas.

### **2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah**

Isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan isu-isu penting adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam atas pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Meskipun tingkat pencapaian kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran serta target Renstra periode yang lalu hasilnya cukup bagus, namun berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Ketersediaan Blanko KTP-El yang masih fluktuatif.

Program Nasional tentang Penerapan KTP-el dimulai Pemerintah Pusat pada Tahun 2012. Pelaksanaan kegiatan ini sifatnya massal dan langsung dikendalikan dari Kemendagri atau Ditjen Dukcapil Kemendagri, sedangkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Tugas Pembantuan yaitu memfasilitasi kegiatan perekaman (mulai pemanggilan penduduk sampai dengan penyiapan sarana penunjang) dan pendistribusian KTP-el yang tercetak. Pada akhir Tahun 2014 tugas pencetakan KTP-el dilimpahkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, sedangkan Ditjen Dukcapil Kemendagri tetap berwenang dalam pengadaan blanko KTP-el, mengendalikan dan memantau kemajuan



pelaksanaan serta memvalidasi data penduduk yang telah melakukan perekaman dan pendistribusian KTP-el.

Seyogyanya KTP dimiliki oleh setiap warga negara yang sudah berusia 17 tahun. Artinya cakupan kepemilikan KTP-el idealnya adalah 100%. Namun apabila masih ada penduduk yang belum memiliki KTP-el, ini merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan. Setidaknya ada beberapa hal yang menyebabkan cakupan kepemilikan KTP-el tidak dapat mencapai 100 % antara lain :

- a. Persediaan blanko KTP-el yang didistribusikan dari Ditjendukcapil Kemendagri masih terbatas dan belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan pencetakan KTP-El Kota Batam dalam 1 tahun;
- b. Kondisi Peralatan cetak KTP-el yang kurang memadai dan hampir tidak pernah di *upgrade*;

## 2. Rendahnya Persentase Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil.

Masih tingginya jumlah penduduk yang belum memiliki Akta Pencatatan Sipil terutama akta perkawinan dan akta kematian. Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya cakupan kepemilikan Akta Pencatatan Sipil diantaranya :

- a. Masih adanya masyarakat yang belum sadar adminduk serta banyak penduduk yang kerja diluar negeri sebagai TKI dalam jangka panjang;
- b. Minimnya pengembangan kualitas SDM terhadap kompetensi di bidang pelayanan;

## 3. Penerapan Sistem SIAK Terpusat

Dalam menghadirkan data kependudukan yang valid dan akurat, sangat dibutuhkan penyusunan perencanaan dan langkah-langkah strategis. Pada awal tahun 2022 Ditjendukcapil Kemendagri telah menerapkan perubahan kebijakan dari Sistem SIAK Terdistribusi kepada Sistem SIAK Terpusat. Per 24 April 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam termasuk Kabupaten/Kota yang paling awal menerapkan dan menjalankan Sistem SIAK Terpusat. Harapannya adalah tersedianya data kependudukan yang valid dan akurat.

## 4. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)

Sebagai langkah transformasi digitalisasi data kependudukan serta mengurangi penggunaan plastik dan kertas dalam mendukung komitmen G20 dan menjawab tantangan SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2022 Ditjendukcapil Kemendagri telah menghadirkan sebuah terobosan dengan menghadirkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang berbasis Andriod yang dapat dengan mudah di akses melalui Smartphone.

Target nasional pada tahun 2023 IKD (Identitas Kependudukan Digital) telah dimanfaatkan sebesar 25 % dari total perekaman KTP-El. Kebijakan ini juga dimaksud untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap kebutuhan blanko KTP-El yang terbatas.

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan/potensi dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang diperkirakan akan muncul, maka perumusan strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan dan mengatasi berbagai kemungkinan dilakukan melalui tahapan strategi. Hasil analisi dimaksud dirumuskan kelemahan/permasalahan internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

a. Faktor Kekuatan

- 1) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041;
- 3) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- 4) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 5) Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan visi dan misi Dinas serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi dan misi Pemerinta Kota Batam.
  - Implemetasi Standar Manajemen Mutu
  - Adanya motivasi belajar aparatur pelaksana yang tinggi

- 6) Jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang telah beroperasi di 12 kecamatan ditambah 1 Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

b. Faktor Kelemahan

- 1) Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai kebutuhan
  - Belum optimalnya pengoperasian teknologi jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
  - Kurangnya sumber daya aparatur dalam pemeliharaan perangkat SIAK
- 2) Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- 3) Belum memadainya sarana dan prasarana dalam pencapaian tujuan, kegiatan dan fungsi, sehingga ketersediaan dan ketercukupannya akan mempengaruhi proses pencapaian tujuan dan target kinerja.

c. Faktor Peluang

- 1) Adanya penerapan nyata Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 serta Permendagri Nomor 100 Tahun 2016. Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman momenklatur instansi di daerah memberikan peluang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk dapat melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mewujudkan Pelayanan Prima, Integritas dan Profesional.
- 2) Adanya media teknologi dan informasi untuk mensosialisasikan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan kepada setiap stakeholder dalam melakukan pelayanan publik. Hal tersebut juga berdampak pada

pelayanan yang dilakukan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil.

d. Faktor Tantangan

- 1) Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah.
- 2) Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.

Perkembangan kehidupan masyarakat saat ini banyak memberikan penekanan perubahan pada pelayanan publik. Kemajuan kehidupan masyarakat secara tidak langsung berimplikasi terhadap permintaan kualitas pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat.

- 3) Adanya stigma dan pola pikir masyarakat bahwa alur kepengurusan Administrasi dan Dokumen Kependudukan itu sulit, mahal, dan berbelit-belit.

## **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam telah mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun yaitu sesuai Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 dengan selalu memperhitungkan perubahan lingkungan. Rencana Strategis ini yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran. Dalam satu periode Renstra Perangkat Daerah akan menuangkan ide-ide dan gagasan rancangan program kerja yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana kerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan sesuai program dan kegiatan serta sub kegiatan dalam mewujudkan sasaran, Visi dan Misi organisasi. Untuk mengetahui sejauh mana relevansi rancangan awal Perangkat Daerah yang tertuang dalam periode Renstra Tahun 2021- 2026 maka diperlukan analisis sesuai dengan kebutuhan suatu organisasi dalam setiap tahunnya. Dalam tabel 2.4 berikut akan disajikan review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Kota Batam**

**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam**

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>17.994.242</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>15.624.721.797</b>	
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>12.121.274</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>12.125.688.461</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	76 Orang/bulan	12.074.094	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 Orang/bulan	12.078.508.461	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	47.180	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	47.180.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>261.891</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>187.754.000</b>	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	110.385	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	41.612.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Orang	151.506	<b>Sub Kegiatan</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	12 Orang	146.142.000	
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.093.273</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>693.699.000</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.033	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	6.481.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2.770.640	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	390.324.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	7.876	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.363.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	27.588	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	24.883.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	280.136	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	257.648.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>569.580</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>948.669.800</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	87 Unit	569.680	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	117 Unit	948.669.800	
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.561.413</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>1.401.260.536</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	70.449	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	47.250.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	416.400	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	417.900.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	1.074.564	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	936.110.536	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>386.809</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase ketersediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Jabatan</b>	<b>100%</b>	<b>267.650.000</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	39.780.000	



No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	141.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	139.400.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	95 Unit	78.349	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	129 Unit	86.970.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	127.280	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.500.000	
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan</b>	<b>94%</b>	<b>569.580</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan</b>	<b>94%</b>	<b>1.667.179.000</b>	
	<b>Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>491.910</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>1.609.471.000</b>	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12 Dokumen	116.616	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	51.001.000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	135.000 Dokumen	375.294	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	135.000 Dokumen	1.558.470.000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Orang</b>	<b>77.670</b>	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Orang</b>	<b>57.708.000</b>	
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	77.670	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	<b>57.708.000</b>	
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil</b>	<b>99%</b>	<b>440.130</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil</b>	<b>99%</b>	<b>361.807.800</b>	
	<b>Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>362.460</b>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>56.151.000</b>	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	38.000 Dokumen	362.460	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	38.000 Dokumen	<b>56.151.000</b>	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Orang</b>	<b>77.670</b>	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>500 Orang</b>	<b>305.656.800</b>	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	1 Laporan	77.670	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	2 Laporan	<b>305.656.800</b>	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>226.137</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan</b>	<b>100%</b>	<b>153.373.000</b>	
	<b>Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama</b>	<b>100%</b>	<b>165.696</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama</b>	<b>100%</b>	<b>56.065.000</b>	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	165.696	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	56.065.000	
	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100 Orang</b>	<b>60.441</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>100%</b>	<b>97.308.000</b>	
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Admin Kependudukanistrasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	60.441	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Admin Kependudukanistrasi	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	97.308.000	
	<b>Grand Total</b>			<b>19.230.090</b>	<b>Grand Total</b>			<b>17.807.081.597</b>	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan gratis untuk masyarakat diwujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Pelayanan KTP elektronik, KK serta semua pengurusan dokumen kependudukan terus di tingkatkan dengan menyiapkan unit mobil keliling lengkap dengan perlengkapan cetak KTP, KK dan Akta Catatan Sipil.

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyerderhanaan prosedur, kepastian waktu, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik. Sehingga dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan yang secara fisik di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu pelayanan prima. Pada masa yang akan datang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menargetkan mendapatkan Sertifikasi Manajemen Mutu Pelayanan Publik **ISO 9001:2015**.

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku**  
**Keperintahan Tahun 2024 Kota Batam**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan

**N I H I L**

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional**

Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang.

Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Administrasi Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam urusan kependudukan yang tertuang di dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 adalah “mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan”, melalui :

1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan, mencakup:
  - a) Perluasan jangkauan layanan pendaftaran penduduk pencatatan sipil bagi seluruh penduduk dan WNI di luar negeri, mencakup: (a) Pendekatan layanan ke tingkat desa dan kelurahan serta layanan di seluruh kantor Perwakilan Republik Indonesia; (b) Peningkatan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan cepat; (c) Pengembangan sistem pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil berbasis teknologi informasi dan terhubung lintas sektor; dan (d) Keterhubungan antar sistem informasi di berbagai lembaga pemerintah.
  - b) Peningkatan kesadaran dan keaktifan masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, mencakup: (a) Pelibatan berbagai sektor pemerintahan dan elemen masyarakat untuk aktif dalam sosialisasi dan advokasi; dan (b) Pengembangan sistem insentif yang tepat untuk mendorong penduduk dan WNI di luar negeri untuk melaporkan peristiwa pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

- c) Percepatan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus.
2. Integrasi sistem administrasi kependudukan, mencakup:
  - a) Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat, lengkap, dan tepat waktu untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, mencakup: (a) Penyediaan statistik hayati yang akurat dari data lintas sektor; dan (b) Pemanfaatan statistik hayati secara optimal untuk pembangunan dan pelayanan publik.
  - b) Penguatan koordinasi, kolaborasi, dan sinkronisasi antar-kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pengembangan statistik hayati, mencakup: (a) Penyusunan kerangka kebijakan dan prosedur pencatatan sipil dan pendaftaran penduduk yang menyeluruh dan selaras antar sektor; dan (b) Penyelenggaraan tata kelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

Pada tahun 2022 Pemerintah Pusat melalui Ditjendukcapil kemendagri melakukan beberapa terobosan diantaranya:

#### 1. Penerapan Sistem SIAK Terpusat

Dalam menghadirkan data kependudukan yang valid dan akurat, sangat dibutuhkan penyusunan perencanaan dan langkah-langkah strategis. Pada awal tahun 2022 Ditjendukcapil Kemendagri telah menerapkan perubahan kebijakan dari Sistem SIAK Terdistribusi kepada Sistem SIAK Terpusat. Per 24 April 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam termasuk Kabupaten/Kota yang paling awal menerapkan dan menjalankan Sistem SIAK Terpusat. Harapannya adalah tersedianya data kependudukan yang valid dan akurat.

#### 2. Penerapan IKD (Identitas Kependudukan Digital)

Sebagai langkah transformasi digitalisasi data kependudukan serta mengurangi penggunaan plastik dan kertas dalam mendukung komitmen G20 dan menjawab tantangan SDGs (*Sustainable Development Goals*) pada tahun 2022 Ditjendukcapil Kemendagri telah menghadirkan sebuah terobosan dengan

menghadirkan IKD (Identitas Kependudukan Digital) yang berbasis Andriod yang dapat dengan mudah di akses melalui Smartphone.

Target nasional pada tahun 2023 IKD (Identitas Kependudukan Digital) telah dimanfaatkan sebesar 25 % dari total perekaman KTP-El. Kebijakan ini juga dimaksud untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap kebutuhan blanko KTP-El yang terbatas.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu -isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan, sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Tujuan Perangkat Daerah berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi.

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.



Berdasarkan arahan makna penetapan tujuan organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam menetapkan Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai yaitu :

***“Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi”***

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai atau dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran jangka menengah yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat
2. Meningkatnya pemanfaatan database kependudukan oleh stakeholder
3. Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan Tujuan pembangunan daerah. Program dan kegiatan dirumuskan dengan melakukan penyesuaian antara kebutuhan program dan kegiatan berdasar hasil analisis kinerja dengan arahan prioritas program dan kegiatan menurut Rancangan Awal RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan Kebijakan Nasional.

Berdasarkan kesepakatan internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, disepakati sebanyak 4 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan yang diusulkan pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024. Rincian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2022 tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 :

**Tabel 3.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Urusan Pemerintahan Bidang Adm. Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b>				<b>17.807.081.597</b>				<b>22.167.009.549</b>
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota</b>	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	<b>Kota Batam</b>	100 %	<b>15.624.721.797</b>			<b>100%</b>	<b>20.887.165.663</b>
	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100 %	<b>12.125688.461</b>			100%	<b>13.037.859.856</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Batam	79 Orang/bulan	12.078.508.461	PAD, Dana Transfer		88 Orang/bulan	12.970.679.856
	<b>Sub Kegiatan</b> Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Batam	12 Dokumen	47.180.000	PAD		24 Dokumen	67.180.000
	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100 %	<b>187.754.000</b>			100%	<b>561.891.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Batam	1 Paket	41.612.000	PAD		4 Paket	240.385.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Batam	12 Orang	146.142.000	PAD		24 Orang	321.506.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Kegiatan</b> Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Batam	100 %	<b>693.699.000</b>			<b>100%</b>	<b>3.438.040.129</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan, Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	6.481.000	PAD		1 Paket	29.033.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Batam	4 Paket	390.324.000	PAD		7 Paket	2.826.677.129
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Batam	2 Paket	14.363.000	PAD		3 Paket	48.876.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Batam	1 Paket	24.883.000	PAD		3 Paket	36.588.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SPKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Batam	12 Laporan	257.648.000	PAD		38 Laporan	496.866.000
	<b>Kegiatan</b> Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	Kota Batam	100 %	<b>948.669.800</b>			<b>100%</b>	<b>1.750.000.000</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Batam	117 Unit	948.669.800	PAD		150 Unit	1.750.000.000
	<b>Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Batam	100 %	<b>1.401.260.536</b>			<b>100%</b>	<b>1.639.484.682</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Batam	1 Laporan	47.250.000	PAD		1 Laporan	75.000.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Batam	4 Laporan	417.900.000	PAD		5 Laporan	469.920.282

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Batam	13 Laporan	936.110.536	PAD		13 Laporan	1.094.564.400
	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	Kota Batam	100 %	<b>267.650.000</b>			<b>100%</b>	<b>459.889.996</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Batam	1 Unit	39.780.000	PAD		1 Unit	41.780.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Batam	4 Unit	139.400.000	PAD		5 Unit	184.750.000
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Batam	129 Unit	86.970.000	PAD		105 Unit	101.079.996
	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Batam	1 Unit	1.500.000	PAD		1 Unit	132.280.000
	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		94 %	<b>1.667.179.000</b>			<b>98%</b>	<b>589.857.048</b>
	<b>Kegiatan</b> Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen pendaftaran penduduk sesuai Standar Pelayanan		100 %	<b>1.609.471.000</b>			<b>100%</b>	<b>509.421.996</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kota Batam	1 Dokumen	51.001.000	PAD		12 Dokumen	116.616.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Sub Kegiatan</b> Penca tatan, Penatausaha an dan Penerbitan Dokumen atas Pen daftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kota Batam	135.000 Dokumen	1.558.470.000	PAD		150.0000 Dokumen	392.805.996
	<b>Kegiatan</b> Penyeleng garaan Pendaftaran Penduduk	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		100 Orang	<b>57.708.000</b>			100 Orang	<b>80.435.052</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Sub Kegiatan Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kota Batam	1 Laporan	57.708.000	PAD		1 Laporan	80.435.052
	<b>Program Pencatatan Sipil</b>	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Kota Batam	99 %	<b>361.807.800</b>			<b>99,50%</b>	<b>455.798.628</b>
	<b>Kegiatan</b> Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang dilayani pengurusan dokumen catatan sipil sesuai Standar Pelayanan	Kota Batam	100 %	<b>56.151.000</b>			<b>100%</b>	<b>375.363.576</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Batam	38.000 Dokumen	56.151.000	PAD		40.000 Dokumen	375.363.576
	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kota Batam	600 Orang	<b>305.656.800</b>			<b>100 Orang</b>	<b>80.435.052</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Kota Batam	2 Laporan	305.656.800	PAD		1 Laporan	80.435.052

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>Program Pengelola an Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Kota Batam	100 %	<b>153.373.000</b>			<b>100%</b>	<b>234.188.210</b>
	<b>Kegiatan</b> Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah melakukan kerjasama	Kota Batam	<b>100 %</b>	<b>56.065.000</b>			<b>100%</b>	<b>171.594.777</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Batam	11 Dokumen	56.065.000	PAD		11 Dokumen	171.594.777
	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Batam	<b>100 Orang</b>	<b>97.308.000</b>			<b>100 Orang</b>	<b>62.593.433</b>
	<b>Sub Kegiatan</b> Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Batam	1 Laporan	97.308.000	PAD		1 Laporan	62.593.433

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah merupakan patokan yang akan digunakan oleh Perangkat Daerah dalam menjalankan Program dan Kegiatan Dinas setiap tahunnya. Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan apa yang telah dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 -2026.

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2021 -2026, pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam akan melaksanakan 4 Program, 12 Kegiatan dan 24 Sub Kegiatan.

Terdapat berbagai macam sumber pedanaan daerah dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Beberapa Sumber pendanaan daerah diataranya adalah Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dll. Rincian Rencanan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Sumber Pendanaan Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam pada Tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini :



**Tabel 4.1**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
2		<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>												
2	1 2									<b>17.807.081.597</b>				
2	1 2	1								<b>15.624.721.797</b>				
2	1 2	1	2. 02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					<b>12.125.688.461</b>				
2	1 2	1	2. 02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Kota Batam	100 %	79 Orang/bulan	100 %	12.078.508.461	PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	1 2	1	2. 02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Dokumen	100 %	47.180.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1 2	1	2. 05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					<b>187.754.000</b>				
2	1 2	1	2. 05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Paket	100 %	41.612.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2 1 2 1 2.05 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Orang	100 %	146.142.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
<b>2 1 2 1 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								<b>693.699.000</b>		
2 1 2 1 2.06 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Paket	100 %	6.481.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 1 2 1 2.06 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4 Paket	100 %	390.324.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 1 2 1 2.06 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	2 Paket	100 %	14.363.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2 1 2 1 2.06 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Paket	100 %	24.883.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2 1 1 2.06	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	12 Laporan	100 %	257.648.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
<b>2 1 2 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>								<b>948.669.800</b>		
2 1 2 2.07	6 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	177 Unit	100 %	948.669.800	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
<b>2 1 2 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								<b>1.401.260.536</b>		
2 1 2 2.08	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Laporan	100 %	47.250.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2 1 2 2.08	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4 Laporan	100 %	417.900.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
2 1 2 2.08	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	13 Laporan	100 %	936.110.536	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	

Kode				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				
2	1	1	2.09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									<b>267.650.000</b>		
2	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	100 %	39,780,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	4 Unit	100 %	139.400.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	
2	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	129 Unit	100 %	86.970.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	

Kode	Urusan/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
2 1 1 2 09 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	Persentase terpenuhinya penunjang urusan Pemerintahan Daerah		100 %	1 Unit	100 %	1.500.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
<b>2 1 2</b>	<b>2</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>						<b>1.667.179.000</b>			
<b>2 1 2</b>	<b>2</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>						<b>1.609.471.000</b>			
2 1 2 2 01 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		100 %	1 Dokumen	94 %	51.001.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
		Paket Pekerjaan Belanja Cetak Formulir, ATK, Kertas dan Cover Penunjang Pelayanan Pendaftaran Penduduk									
2 1 2 2 01 2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		100 %	135.000 Do kumen	94 %	1.558.470.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
		Paket Pekerjaan Belanja Ribbon/Tinta Printer Cetak KTP-El dan Pengadaan Blanko KIA (Kartu Identitas Anak)									

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2	1 2	2	2. 03	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>							<b>57.708.000</b>				
2	1 2	2	2. 03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan		100 %	1 Laporan	94 %	57.708.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
Paket Pekerjaan Belanja Seminar Kit, Cetak Spanduk, Sewa Gedung Pertemuan, Konsumsi dan Honorarium Nara Sumber															
2	1 2	3		<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>							<b>361.807.800</b>				
2	1 2	3	2. 01	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>							<b>56.151.000</b>				
2	1 2	3	2. 01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil		100 %	38.000 Dok umen	99 %	56.151.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
Paket Pekerjaan Belanja Cetak Formulir, ATK, Kertas dan Cover Penunjang Pelayanan Pencatatan Sipil															
2	1 2	3	2. 02	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>							<b>305.656.800</b>				
2	1 2	3	2. 02	8	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen catatan sipil		100 %	2 Laporan	99 %	305.656.800	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
Paket Pekerjaan Belanja Seminar Kit, Cetak Spanduk, Sewa Gedung Pertemuan, Konsumsi dan Honorarium Nara Sumber															

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan							
2	1 2	4			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>						<b>153.373.000</b>				
2	1 2	4	2. 01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>						<b>56.065.000</b>				
2	1 2	4	2. 01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan		100 %	11 Dokumen	100 %	56.065.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
					Paket Pekerjaan Belanja ATK, Penggandaan dan Penjilidan, Konsumsi Rapat, Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi ke Dirjendukcapil										
2	1 2	4	2. 03		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>						<b>97.308.000</b>				
2	1 2	4	2. 03	5	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase lembaga pengguna yang telah mendapatkan hak akses sesuai ketentuan		100 %	1 Laporan	100 %	97.308.000	PENDAP ATAN ASLI DAERA H (PAD)	
					Paket Pekerjaan Belanja Seminar Kit, Cetak Spanduk, Sewa Gedung Pertemuan, Konsumsi dan Honorarium Nara Sumber										
										<b>TOTAL</b>	<b>17.807.081.597</b>				

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan program, kegiatan dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam 2021 –2026. Pada dasarnya Renja Tahun 2024 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 mencakup 24 Sub Kegiatan, 12 Kegiatan dalam 4 Program untuk mencapai 1 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Target Kinerja yang ada pada Renja Tahun 2024 mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2024 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan menjadi tolok ukur dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dalam upaya mencapai Visi, Misi serta Tujuannya.

Melalui Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern dan Sejahtera.

#### ➤ **Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tahun 2024 ini, disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya Renja ini, maka :

1. Renja ini akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024;
2. Semua pihak dan pemangku kepentingan/*stakeholders* yang berkaitan dengan pembangunan urusan kependudukan, terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;



3. Renja ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja (LKjIP) Tahun 2024 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Tahun 2024;

➤ **Rencana Tindak Lanjut**

Untuk rencana tindak lanjut ke depan, apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026. Pada akhir tahun anggaran 2022 dilakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga tidak menutup kemungkinan apabila terdapat masukan dan perubahan yang konstruktif akan dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Demikian Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tahun 2024 ini disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2024.

Batam, 03 Agustus 2023



**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM,**

**HERYANTO, S.E.**

NIP. 19641107 199203 1 015